

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dunia usaha saat ini telah berkembang sangat cepat dan pesat, mengapa dikatakan demikian karena usaha memiliki peranan yang penting bagi pembangunan dan kemajuan khususnya di Negara Indonesia. Dapat terpenuhinya kebutuhan masyarakat baik barang maupun jasa tentu yang menjadi pelaku utamanya. Membahas mengenai pembangunan jelas bahwa salahsatu penyumbang terbesar bagi Negara dalam konteks ekonomi adalah dari industri ini, sebagai contoh neraca perdagangan, GDP maupun stabilitas keuangan akan bersinergi dari sektor ini. Yang selanjutnya suatu Negara akan mengalami kemajuan tidak lain dari pertumbuhan ekonomi yang terus naik dan positif.

Paradigma yang masih terbentuk saat ini bahwa industri (perusahaan) dalam menjalankan keberlangsungannya akan berorientasi pada keuntungan (*profit*), sebagaimana teori prinsip ekonomi bahwa pemasukan selayaknya harus lebih besar daripada pengeluaran. Sehingga hanya berfokus pada satu tujuan tanpa memperhatikan unsur lainnya. Seiring berjalannya waktu publik paham dan merasa bahwa usaha memiliki dampak yang perlu dicermati dan kaji. Hal ini dibuktikan dengan adanya fenomena pencemaran limbah yang langsung berdampak pada kelangsungan hidup masyarakat itu sendiri, bahkan tempat dimana manusia berpijak di bumi juga ikut rusak karena tidak diperhatikannya aspek ini. (Muqodim dan Susilo, 2013) juga mengatakan terkadang perusahaan mengabaikan dampak negatif dari usaha untuk memaksimalkan keuntungan tersebut bagi lingkungan di sekitarnya. Dampak negatif tersebut semakin lama semakin besar dan kompleks yang bisa jadi sukar untuk dikendalikan seperti polusi, kebisingan, diskriminasi, pemaksaan, kesewenang-wenangan dan dampak sejenis lainnya.

Dengan adanya hal itu masyarakat fokus pada lingkungan dan dirinya sendiri, dengan mendorong bisnis untuk melihat gambaran besar

dan melihat dampaknya di sekitar mereka. Sebuah filosofi dasar yang disebarkan saat ini adalah bagaimana pentingnya bahwa bisnis mengatasi semua nilai dalam pelaporan untuk mengurangi kemungkinan bahwa aktivitas mereka akan membahayakan sumber daya global, tidak hanya bagi penduduk hari ini tapi untuk generasi mendatang. Kesadaran ini yang memodifikasi kebijakan dan prosedur dan telah dijuluki Pembangunan Berkelanjutan (WCED, 1987 dalam Jackson et.al, 2011).

Dampak lingkungan dan sosial pembangunan ekonomi dunia menyebabkan banyak persoalan diantaranya masalah sosial, pemanasan global, bencana alam dan polusi. Oleh karenanya banyak perusahaan yang membahas isu sosial dan lingkungan kedalam permasalahan ekonomi mereka (Muttanachai, 2012). Sudah menjadi fakta banyaknya resistensi masyarakat sekitar diberbagai tempat dan waktu muncul terhadap perusahaan yang dianggap tidak memperhatikan aspek-aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Di dalam akuntansi konvensional, pusat perhatian perusahaan hanya terbatas kepada *stockholders* dan *bondholders*, yang memberikan kontribusi langsung terhadap perusahaan, sedangkan pihak lain sering terabaikan. Kemudian bermacam kritik disampaikan bahwa akuntansi konvensional dianggap tidak dapat lagi mengakomodir kepentingan *stakeholder*. (Almilia dan Dwi, 2007) mengemukakan bahwa akuntabilitas perusahaan dituntut untuk tidak sekedar dari sisi pemegang saham maupun kelompok kreditor. Banyak industri yang memiliki kinerja ekonomi dan memiliki kontribusi yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi juga disinyalir menciptakan dampak negatif. Semakin besarnya dampak terhadap kehidupan masyarakat menyebabkan masyarakat menginginkan agar dampak tersebut dapat dikontrol sehingga dampak negatif yang ditimbulkannya tidak semakin besar. Dari sini berkembanglah ilmu akuntansi yang tidak hanya memberikan informasi tentang kegiatan perusahaan dengan pihak ketiga tetapi juga dengan lingkungannya. Sehingga muncul konsep akuntansi yang baru, yang disebut sebagai *Corporate Social Responsibility (CSR)*. Informasi yang diungkapkan tidak hanya keuangan perusahaan, namun juga mengenai

dampak (*externalities*) sosial dan lingkungan hidup yang diakibatkan aktivitas perusahaan. Sehingga perusahaan bukan lagi sebagai entitas yang hanya mementingkan tujuannya sendiri namun harus memperhatikan kepentingan lingkungan dan sosialnya (Sandra dan Kartawijaya, 2011).

Konsep *CSR* merupakan tanggung jawab perusahaan kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*) dan/atau pihak yang terkena dampak dari keberadaannya. Adanya dampak dari aktivitas perusahaan telah menyadarkan bahwa kerusakan lingkungan yang terjadi dapat dikurangi agar dapat dimanfaatkan oleh generasi mendatang. Tekanan *stakeholders* terhadap perusahaan untuk dapat secara efektif melakukan kegiatan lingkungan serta tuntutan agar perusahaan menjadi akuntabel juga menyebabkan meningkatnya perusahaan yang melakukan pengungkapan lingkungan (Deegan dan Gordon, 1996). Praktek pengungkapan tanggungjawab social telah diatur oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAII dalam PSAK No. 1 paragraf 9 yang secara implisit menyarakankan bahwa pengungkapan tanggungjawab sosial berkaitan masalah lingkungan dan social, sehingga laporan bisa tersampaikan kepada seluruh *stakeholder*. Ketentuan mengenai pelaksanaan *CSR* di Indonesia diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan juga terdapat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (sebagai pengganti Bapepem LK) No. X.K.6 (Oktariani dan Mimba, 2014)

Manajemen dalam suatu entitas harus menangkap paradigma pertumbuhan ekonomi menjadi motivasi dalam pengembangan perusahaan yang berkelanjutan (*sustainability development*), karena perusahaan mempunyai peranan penting dalam perkembangan perekonomian. Kinerja perusahaan selain diukur secara ekonomi (*single bottom*) dari segi laba/keuntungan perusahaan saja juga memerlukan dua pengukuran lainnya yaitu *social responsibility* dan *environment responsibility* yang dikenal dengan konsep *Triple Bottom Line* (Gatot dalam Sehlla, 2019).

Konsep ini sebenarnya sudah ada dan banyak berkebang diterapkan di Negara Eropa. *Triple Bottom Line (TBL)* merupakan konsep yang dikembangkan oleh John Elkington pada tahun 1997 melalui bukunya yang berjudul "*Cannibals with Fork, the Triple Bottom Line of Twentieth Century Business*" (Yanti dan Rasmini, 2015). Elkington menyatakan bahwa selain mengejar profit, perusahaan harus memperhatikan dan terlibat pada pemenuhan kesejahteraan masyarakat (*people*) dan berkontribusi aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan (*planet*). Adapun Smith dan Sharicz (2011) dalam Ariastini dan Semara (2019) menyatakan bahwa *TBL* merupakan,

"The result of the activities of an organization voluntary or governed by law, that demonstrate the ability of the organization to maintain viable its business operations (including financial viability as appropriate) whilst not negatively impacting any social or ecological systems" - *TBL* merupakan unsur penting yang harus diperhatikan oleh perusahaan. *TBL* dapat menjadi tolak ukur perusahaan, dengan tidak hanya memperhatikan sisi ekonomi, namun juga dampak yang ditimbulkan baik positif maupun negatif terhadap sosial dan lingkungan.

Ide di balik paradigma *triple bottom line* adalah bahwa keberhasilan akhir perusahaan atau kesehatan dapat dan harus diukur tidak hanya dengan garis bawah keuangan tradisional, tetapi juga oleh kinerja sosial / etika dan lingkungan (Norman dan McDonald, 2003 dalam Ekwueme, 2013). Mewajibkan perusahaan untuk melaporkan secara teratur mengenai dampak kegiatan mereka telah di lingkungan akan memungkinkan: (a) para pemangku kepentingan untuk diberitahu tentang sifat kegiatan perusahaan terlibat dalam; (b) para pemangku kepentingan untuk memantau efek kegiatan tersebut terhadap lingkungan mereka; dan (c) perusahaan dalam konsultasi dengan pemangku kepentingan terkait akan dapat menerapkan strategi untuk meminimalkan efek dari kegiatan tersebut (Reddy & Gordon, 2010).

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris mengenai pentingnya pengungkapan *TBL* di Indonesia dan faktor yang

mempengaruhinya, dan diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan kepada pemerintah agar dapat memberikan pedoman khusus untuk pengungkapan kegiatan *TBL* yang dilakukan perusahaan baik dalam laporan keuangan, *website* ataupun laporan terpisah lainnya guna memberikan informasi yang komprehensif kepada *stakeholders*.

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan *TBL* di Indonesia?
2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap pengungkapan *TBL* di Indonesia?
3. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan *TBL* di Indonesia?
4. Apakah likuiditas berpengaruh terhadap pengungkapan *TBL* di Indonesia?
5. Apakah kepemilikan asing berpengaruh terhadap pengungkapan *TBL* di Indonesia?
6. Apakah jenis industri berpengaruh terhadap pengungkapan *TBL* di Indonesia?

C. TUJUAN PENELITIAN

Dari perumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini diantaranya:

1. Menguji secara empiris bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan *TBL* di Indonesia.
2. Menguji secara empiris bahwa *leverage* berpengaruh terhadap pengungkapan *TBL* di Indonesia.
3. Menguji secara empiris bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan *TBL* di Indonesia.

4. Menguji secara empiris bahwa likuiditas berpengaruh terhadap pengungkapan *TBL* di Indonesia.
5. Menguji secara empiris bahwa kepemilikan asing berpengaruh terhadap pengungkapan *TBL* di Indonesia.
6. Menguji secara empiris bahwa jenis industri berpengaruh terhadap pengungkapan *TBL* di Indonesia.

D. MANFAAT PENELITIAN

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam aktivitas perusahaan mengenai pengungkapan *TBL*, diantaranya:

1. Pengungkapan *TBL* oleh perusahaan yang ada di Indonesia dapat membantu pemerintah dalam mengambil informasi untuk merumuskan kebijakan yang tepat berkaitan dengan *sustainability report* (pengungkapan *TBL*) perusahaan yang *go public*.
2. Perusahaan yang melakukan pengungkapan *TBL* dapat mengambil langkah/keputusan serta informasi untuk merumuskan standar kebijakan yang berorientasi pada pertanggungjawaban perusahaan di lingkup internal maupun eksternal, terlebih memperhatikan pada tanggungjawab sosial.
3. *Agen* atau manajemen sebagai pelaksana pengendalian terhadap manajemen dapat melaksanakan sistem pengendalian manajemen/tata kelola yang berkualitas tanpa merugikan pihak lain dan dengan memperhatikan situasi dan kondisi disekitar.
4. Dampak daripada pengungkapan *TBL* akan dapat dirasakan masyarakat berupa timbal balik langsung maupun tidak langsung tanpa adanya kesenjangan sosial dan lingkungannya.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Sebagai arahan untuk memudahkan dalam penelitian ini, maka penulis menyajikan susunan penulisan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini diuraikan mengenai faktor yang berpengaruh terhadap pengungkapan *triple bottom line* antara lain: ukuran perusahaan, *leverage*, profitabilitas, likuiditas, kepemilikan asing dan jenis industri serta hipotesis dan kerangka penelitian serta hipotesis dari masing-masing variabel dan gambar kerangka pemikiran.

BAB III. METODE PENELITIAN

Menjelaskan metode penelitian yang digunakan meliputi jenis penelitian, populasi dan sampel, data dan sumber data, definisi operasional dan pengukuran variabel serta metodologi/alat analisis data.

BAB IV. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Berisi penyajian dan analisis data. Pada bab penelitian menyajikan dan menyelesaikan hasil pengumpulan serta analisis data, sekaligus merupakan jawaban atas hipotesis yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya.

BAB V. PENUTUP

Menyajikan simpulan yang diperoleh, keterbatasan serta saran-saran yang perlu disampaikan.